

Periode : Semester /Genap
Tahun : 2018/2019
Kode Renstra : DM & NISH

LAPORAN AKHIR

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

**“BUKU MOSAIK HIJAU PENGADAAN LAHAN
RUANG TERBUKA HIJAU”
(JAKARTA SELATAN, APRIL-JULI 2019)**



Oleh :

Laili Fuji Widyawati, ST,MT (0328028504)
Prama Ardha Aryaguna (0308039102)
Wa Ode Nurhaidar (0320118503)
Ardelia Shelomita Teena (20170202014)
Gusmirona (20170202026)
Galih Destyan Mulyana (2016-02-02024)
Ega Putri Utami (2014-22-040)
Arfan Ferdiansyah (2014-22-038)

**Fakultas Teknik / Perencanaan Wilayah Dan Kota
Universitas Esa Unggul**

SURAT TUGAS

No. : 15/S.Ket-Penelitian/LPPM/UEU/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc

Jabatan : Kepala LPPM

Alamat : Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Laili Fuji Widyawati, SI, MT

Jabatan : Dosen Tetap Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Esa Unggul

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul kegiatan "**Buku Mosaik Hijau Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan,**" di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada semester genap 2018-2019.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala LPPM



(Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc)

SURAT KETERANGAN

No. 076/S.Ket-Abdimas/LPPM/UEU/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

Jabatan : Kepala LPPM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	Nama	NIDN	Fakultas	Kecanggotaan
1	Laili Fuji Widyawati, ST, MT	0328028504	Teknik	Ketua
2	Prama Ardha Aryaguna, S.Si, M.Sc	0307087003		Anggota
3	Wa Ode Nurhaidar, S.T, M.Sc	0320118503		Anggota

Telah melaksanakan dan menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Buku Mosaik Hijau Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau" pada April - Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Kepala LPPM



Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

NIK. 209100388

RINGKASAN

Mosaik atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata mosaic (/mō'zā-ik/) yang merupakan kata benda dengan pengertian suatu gambar atau pola yang dihasilkan dengan penyusunan potongan-potongan kecil dan berwarna. Dalam arti luas seperti dalam bidang lain, diartikan sebagai pembentukan komposisi tunggal dari potongan-potongan yang lebih kecil seperti rangkaian peristiwa. Mosaik hijau adalah sebuah analogi terkait urgensi pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang saat ini tersebar bak kepingan-kepingan kecil, yang kami susun sehingga tercipta pola maupun desain hijau yang cantik menjadi wajah suatu kota sekaligus bermanfaat bagi lingkungan.

Ruang terbuka hijau bak urgensi hidup dan mati, hal ini terkait dengan dampaknya terhadap manusia dan keberlangsungan generasi mendatang. Namun faktanya pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau bukanlah hal yang mudah khususnya di Jakarta dimana lahan adalah aset yang bernilai tinggi. Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan terkait lokasi potensial terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

Buku Mosaik hijau merupakan bentuk pengabdian masyarakat tim Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul dengan mitra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buku ini terbagi menjadi lima bagian yaitu (1) Urgensi Kota Hijau Jakarta: Hidup/Mati; (2) Diawali Selatan Jakarta; (3) Mari Kita Rencanakan; (4) Mosaik Hijau: Menemukan Kembali Serpihan RTH di Jakarta; dan (5) Kesimpulan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. ANALISA SITUASI

Sebagai kawasan metropolitan, pembangunan di Jakarta bersifat massif dan pesat. Provinsi DKI Jakarta dengan luas 662 km² telah menjadi ruang hidup bagi 10 juta jiwa, bahkan di tahun 2035 penduduk DKI Jakarta diproyeksikan sebanyak 11,459 juta jiwa (BPS, 2018). Fungsi Jakarta sebagai ibu kota, dengan fungsi pemerintahan dan perekonomian mendorong gencarnya pembangunan gedung maupun hunian. Alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi non hijau pun tak pelak dihindari.

Satu per satu kawasan hijau mulai beralih menjadi fungsi hunian maupun fungsi penunjang ekonomi. Perannya sebagai penjaga kualitas air, penyedia oksigen, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati seakan tidak terlalu penting dibandingkan nilai ekonomi dari alih fungsi lahan.

Hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari wajah kota merupakan suatu bencana. Kota mulai kelebihan beban, semakin sesak, dan padat, lahan terbatas, kesulitan air bersih, ancaman banjir dan rendahnya kualitas udara. Tahun 2019 Greenpeace pernah merilis data bahwa dari Januari hingga Desember 2018, Jakarta hanya memiliki Kualitas Udara yang baik, sedangkan 196 hari lain tergolong tidak sehat. Lazimnya bencana, orang-orang akan mencari sesuatu yang bernilai, tersadar untuk mencari lahan dan menyediakan kembali ruang hijau di Ibukota.

Apabila suatu kota tidak direncanakan dan dikelola dengan memperhatikan dampak pemanasan global dan perubahan iklim maka kota tersebut akan menuju bunuh diri baik secara ekologi maupun ekonomi. Sejatinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip hijau, dimana terdapat komitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan peluang generasi mendatang.

Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah 145,73 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Depok. Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 kelurahan.

Berdasarkan data Identifikasi RTH Eksisting Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, Jakarta Selatan yang saat ini terdapat RTH seluas 696,80 ha, yang terdiri dari RTH mengelompok/ areal seluas 557,63 ha dan RTH memanjang/jalur seluas 141,17 ha. Secara luasan, RTH eksisting di Jakarta Selatan hanya mencapai 4,95% dari total luas Jakarta Selatan. Sebaran RTH terbanyak berada di Kecamatan Pasar Minggu, yaitu seluas 196,96 ha sedangkan daerah dengan sebaran RTH minim adalah Kecamatan Mampang Prapatan, yaitu seluas 6,19 ha.



Gambar Sebaran RTH Eksisting Jakarta Selatan

Gambar Luas RTH Eksisting Jakarta Selatan Tahun 2018 (Ha)

1.2. PERMASALAHAN MITRA

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta Selatan menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan permukiman serta fasilitas dasar perkotaan pendukungnya. Sebagai dampaknya, perubahan guna lahan yang mengalami peningkatan di wilayah ini adalah komersial dan pemerintahan, serta fasilitas umum. Pertumbuhan lahan komersial dan perkantoran antara lain terlihat di

sepanjang Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Fatmawati dan Jalan Pangeran Antasari. Kondisi ini terjadi karena kegiatan ekonomi yang ada di Jakarta Selatan cenderung meningkat pada bidang jasa. Hal ini ditunjukkan dalam PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi, real estat, dan jasa perusahaan sebesar 32,78% pada tahun 2017 (BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018). Perubahan guna lahan tersebut mengakibatkan lahan-lahan potensial untuk pengembangan RTH menjadi terbatas karena semakin meningkatnya lahan terbangun untuk mendukung kegiatan ekonomi-sosial masyarakat, padahal RTH sangat berperan sebagai penyangga keseimbangan lingkungan perkotaan. Sementara itu, wilayah Jakarta Selatan saat ini masih menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup sebagai berikut:

a. Kerentanan perubahan iklim

DKI Jakarta adalah salah satu wilayah kota yang paling rentan dan berisiko terhadap perubahan iklim. Dalam dokumen RAD API DKI Jakarta dijelaskan bahwa DKI Jakarta mempunyai kecenderungan peningkatan suhu permukaan dengan laju $0,09730^{\circ}\text{C}/\text{tahun}$, kenaikan permukaan laut juga telah terjadi di wilayah DKI Jakarta dan diperkirakan akan meningkat hingga 0,9 m pada tahun 2100. Amblasan tanah (*land subsidence*) yang terjadi di wilayah DKI Jakarta juga memicu kenaikan muka air laut. Perubahan siklus hidrologi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis menjadi lebih sering terjadi di wilayah DKI Jakarta antara lain banjir, rob, dan kekeringan, bahkan secara tidak langsung berdampak pada kesehatan dengan adanya penyakit demam berdarah (DBD).

Dokumen RAD API DKI Jakarta menunjukkan bahwa kondisi kerentanan perubahan iklim di wilayah DKI Jakarta sangat bervariasi berdasarkan proyeksi tahun 2025. Untuk Jakarta Selatan, hampir seluruh kecamatan terdapat kelurahan yang tingkat kerentanannya tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan kemampuan adaptif dalam rangka mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dalam konteks ini, pengembangan RTH dapat menjadi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena berkontribusi untuk menyerap karbon dan pengendalian banjir/genangan. Dalam konteks ini, Rancangan RPPLH DKI Jakarta mengarahkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui reforestasi sabuk hijau dan aforestasi, pengembangan dan pemeliharaan taman, hutan kota, kawasan mangrove dan koridor keanekaragaman hayati.

b. Bencana alam

Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan kebencanaan yang cukup kompleks. Selain ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana alam lainnya berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman. Berdasarkan data dari Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 (BNPB, 2012) diketahui bahwa setiap wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki prioritas bencana masing-masing dengan peluang bencana yang akan terjadi di Jakarta Selatan adalah bencana longsor, gempa bumi dan banjir daratan (*in-land*). Peluang bencana longsor terdapat di Kecamatan Pesanggrahan. Peluang bencana gempa bumi terdapat di

Kecamatan Kebayoran Lama, Mampang Prapatan. Cilandak, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Sedangkan peluang bencana banjir daratan terdapat di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Kabayoran Baru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pancoran, Cilandak, Pasar Minggu, Pancoran, Setiabudi, dan Tebet. Terkait dengan karakteristik wilayah yang rawan terhadap bencana alam, maka penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam penataan ruang diantaranya untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi area mitigasi/evakuasi bencana. Oleh karena itu, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 mengamankan penyediaan RTH pada kawasan rawan bencana melalui optimalisasi pemanfaatan RTH publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana yang dilengkapi dengan utilitas evakuasi yang memadai.

c. Pemanfaatan sumber daya lahan berlebih

Kebutuhan lahan di wilayah perkotaan bergantung pada jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi yang ada. Jumlah penduduk dan intensitas ekonomi perkotaan semakin meningkat sedangkan sumber daya lahan yang dimiliki suatu kota jumlahnya relatif tetap menjadi *gap* dan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya lahan. Lahan di wilayah Jakarta Selatan antara lain digunakan untuk permukiman, pengembangan sarana dan prasarana kota, perkantoran, perdagangan dan jasa. Jenis penggunaan lahan tersebut sebagian besar dalam bentuk lahan terbangun.

Berdasarkan Materi Teknis RPPLH DKI Jakarta, secara umum daya dukung lahan DKI Jakarta sudah terlampaui yang ditandai dengan tingginya intensitas pemanfaatan ruang di DKI Jakarta telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Hasil analisis daya dukung lahan DKI Jakarta tersebut memperlihatkan bahwa daya dukung lahan untuk wilayah Jakarta Selatan yang belum terlampaui meliputi 20 kelurahan dalam kondisi baik dan 39 kelurahan dalam kondisi sedang. Sementara itu, kondisi wilayah dengan daya dukung lahan yang telah terlampaui terdapat pada enam kelurahan, yaitu Gandaria Utara, Cipete Utara, Pela Mampang, Bukit Duri, Menteng Atas, Pasar Manggis. Terlampauinya daya dukung lahan tersebut mengindikasikan besarnya tekanan atau beban terhadap lingkungan. Dengan demikian, pengembangan RTH sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi daya dukung lahan di Jakarta Selatan yang akan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

d. Rendahnya kualitas udara

Peran DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi negara mempengaruhi kualitas udara perkotaan. Tekanan kualitas udara yang dihadapi DKI Jakarta adalah pencemaran udara perkotaan antara lain bersumber dari transportasi darat. Mobilisasi yang tinggi masyarakat Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai komuter yang beraktivitas di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan moda transportasi publik, namun masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Berbagai macam inovasi pembayaran yang memudahkan pembelian kendaraan pribadi mendorong fenomena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan di DKI Jakarta tak terhindarkan yang menimbulkan tingginya emisi kendaraan bermotor yang memperburuk kualitas udara ambien. Selain itu, penggunaan energi untuk kegiatan operasional dari

industri dan pembangkit listrik di DKI Jakarta yang cenderung semakin meningkat setiap tahunnya juga mempengaruhi kualitas udara perkotaan.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Jagakarsa yang terletak di Jakarta Selatan, jumlah hari dengan kategori Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) “baik” hanya 41 hari pada tahun 2018. Pencemaran udara yang berimplikasi pada turunnya kualitas udara ambien perkotaan ini dapat berdampak pada gangguan kesehatan seperti penyakit asma, bronkitis dan ISPA. Dampak lainnya adalah penurunan estetika kota dan hujan asam. Hampir setiap hari kabut tipis yang berasal dari sumber-sumber pencemaran udara menyelimuti DKI Jakarta. Kabut tipis tersebut merupakan kumpulan emisi udara yang memicu hujan asam. Namun demikian, ketersediaan RTH yang dapat mengurangi tekanan terhadap kualitas udara ini masih sangat minim.

Berbagai masalah lingkungan hidup tersebut mengindikasikan bahwa pengadaan RTH menjadi prioritas masalah dikarenakan mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Namun, saat ini RTH semakin terdesak karena adanya peralihan peruntukan ruang menjadi bangunan. Di sisi lain, lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dengan optimal menyebabkan munculnya lahan-lahan terlantar dan sengketa lahan. Sementara itu, proses penyediaan RTH terkendala oleh tingginya harga lahan dalam proses pembebasan lahan.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Salah satu andil Pemerintah adalah melalui penerapan kebijakan pelestarian lingkungan melalui penataan ruang. Penataan ruang diperlukan untuk menjaga kualitas ruang wilayah dan juga keberlanjutannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH menjadi salah satu muatan dalam tata ruang wilayah kota yang terdiri atas RTH publik dengan proporsi 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat dengan proporsi 10% dari luas wilayah kota.

Nirwono Yoga (2019) merilis simulasi terkait target dan kemampuan pencapaian dalam peningkatan kuantitas RTH. Menurut beliau dengan luasan Jakarta 65.000 Ha maka luasan RTH 30% sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 sebesar 19.500 Ha. Apabila target 19.500 Ha dikurangi dengan luasan RTH eksisting saat ini yaitu sekitar 6.500 Ha maka Jakarta harus mencari lahan seluas 13.000 Ha dengan peruntukan sebagai RTH. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk peningkatan kuantitas RTH sebesar 13.000 Ha? Sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban tidak hanya dari Pemerintah namun juga segenap lapisan masyarakat Jakarta.

Ditengah tingginya harga lahan Jakarta, masih ada harapan untuk mengumpulkan potongan-potongan, serpihan-serpihan ruang yang dinilai potensial sebagai ruang terbuka hijau. Keping-keping tersebut akan dikumpulkan hingga menjadi satu pola Ruang Terbuka Hijau yang tidak hanya mempercantik Kota namun juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan. Hal ini sejalan dengan strategi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yaitu memfungsikan kembali ruang dan kawasan yang berpotensi dan/atau peruntukan sebagai RTH, dan sinergis dengan Roadmap Penyelenggaraan Kota Hijau terkait strategi pendayagunaan lahan ruang terbuka kota untuk ruang terbuka hijau.

Menindaklanjuti Masterplan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta 2018-2038 yaitu Mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan metode pengembangan Ruang Hijau (RH) dan database yang unggul dan terbarukan, serta memiliki sistem pengelolaan RH berbasis GIS, maka Tim penyusun melakukan Kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini harapannya tersusun database yang mampu menjadi sumber informasi terkait sebaran lahan potensial Jakarta yang dijelaskan secara spasial.

Buku Mosaik hijau merupakan bentuk pengabdian masyarakat tim Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul dengan mitra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Luaran dalam kegiatan ini berupa produk Buku. Buku ini merupakan rangkuman kajian pengadaan lahan RTH yang mencakup analisa spasial dan lingkungan. Buku Mosaik Hijau terbagi menjadi lima bagian yaitu (1) Urgensi Kota Hijau Jakarta: Hidup/Mati; (2) Diawali Selatan Jakarta; (3) Mari Kita Rencanakan; (4) Mosaik Hijau: Menemukan Kembali Serpihan RTH di Jakarta; dan (5) Kesimpulan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Metodologi yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau Jakarta Selatan melalui kajian data sekunder dan analisis data baik secara kuantitatif dan kualitatif. Beberapa tahapan pekerjaan yang dilakukan metodologi yang dipilih adalah

B. Persiapan dan Survey Pendahuluan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari persiapan umum, menyiapkan bahan dan materi yang terkait kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan RTH DKI Jakarta, termasuk menyiapkan administrasi pendukung. Presentasi rencana kerja, mempresentasikan rencana mengenai: Metode Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, rencana mobilitas tenaga pekerja dan alat, dan tata cara koordinasi baik dengan pemerintah maupun masyarakat.

C. Pengumpulan dan Kajian Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berasal dari literatur dan instansi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, terkait peraturan dan kebijakan serta kondisi fisik maupun non fisik dari area perencanaan RTH DKI Jakarta. Data mengenai kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan area-area RTH prioritas dalam pengadaan lahan rencana hijau. Kajian data sekunder mengenai kawasan Jakarta Selatan bertujuan untuk memahami profil kawasan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan penyusunan kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan RTH. Data fisik kawasan diperlukan sebagai gambaran area-area alami yang harus dilestarikan dalam bentuk RTH alami, pertimbangan pengembangan RTH pada area rawan bencana, pada daerah yang berpotensi sebagai area tangkapan air, serta kebutuhan RTH buatan pada ruang-ruang kota.

Tabel Daftar Kebutuhan Kebijakan RTH Jakarta Selatan

No.	Data Sekunder Terkait Kebijakan RTH	Sumber
1.	UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	- Website terkait - Survei instansional di DKI Jakarta
2.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.	
3.	<i>Masterplan</i> Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta 2018-2038	
4.	Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta.	

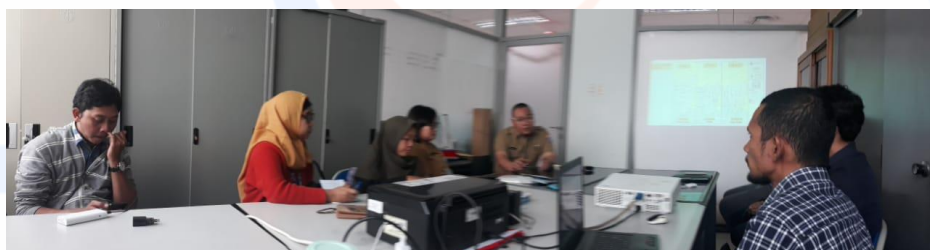
Tabel Kebutuhan Data Sekunder Terkait Area RTH Jakarta Selatan

No.	Data Sekunder Terkait Area Perencanaan RTH	Sumber
1.	Shapefile RDTR Jakarta Selatan	- Website terkait - Survei instansional di DKI Jakarta
2.	Shapefile Persil BPN Jakarta Selatan	
3.	Shapefile Persil P4T Jakarta Selatan	
4.	Shapefile RTH Aset Pemda Jakarta Selatan	
5.	Citra Satelit Terbaru Jakarta Selatan	
6.	Shapefile Guna Lahan Jakarta Selatan	
7.	Shapefile Lahan Kosong Jakarta Selatan	

D. Rapat Koordinasi dan FGD

Dalam pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh anggota tim dan supervisi selama seminggu sekali di hari Jumat. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, dibahas progress hasil pengumpulan data dan hasil analisis sesuai tugas masing-masing anggota tim. Koordinasi dan evaluasi merupakan strategi dalam penyelesaian pekerjaan.



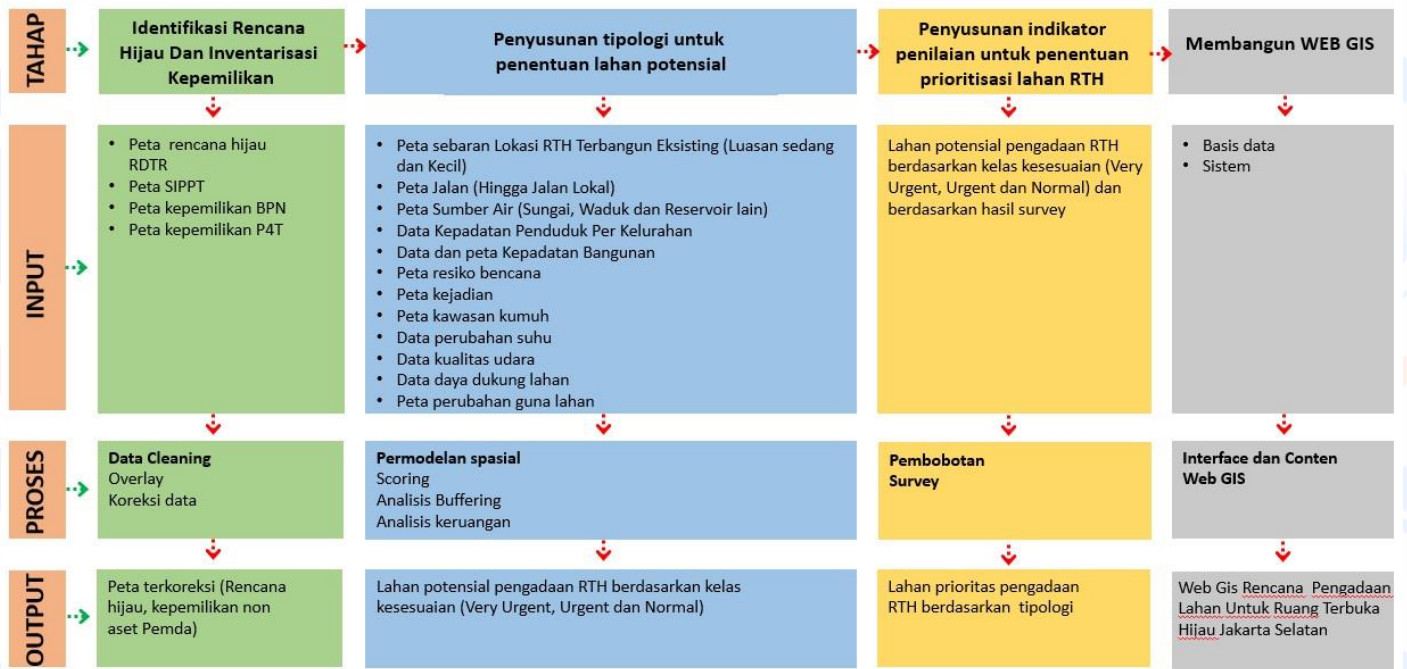




E. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar tahapan pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau ini antara lain meliputi identifikasi rencana hijau dan inventarisasi kepemilikan, penyusunan tipologi untuk penentuan lahan potensial, penyusunan indikator penilaian untuk penentuan prioritas lahan RTH dan membangun WEB GIS hijau yang merupakan sistem informasi yang memuat informasi jumlah dan sebaran lokasi RTH baik dari rencana maupun eksisting hasil olahan dan analisa. Pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan ini adalah pendekatan spasial menggunakan teknik pemetaan. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam beberapa bulan, dimulai dari maret sampai juni.

3.2 Gambaran IPTEKS yang Ditransfer



BAB IV

KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1 Bentuk Kegiatan Abdimas

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion dan kajian dengan luaran buku Mosaik Hijau Pengadaan Lahan RTH.

Focuss Group Discussion merupakan salah satu teknik untuk menjangring informasi dan aspirasi dari narasumber maupun stakeholder terkait. Dalam rangka penyusunan kajian pengadaan lahan RTH Jakarta Selatan diadakan FGD sebanyak tiga kali yaitu tanggal 21 Juni 2019, 11 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 dengan menghadirkan narasumber multi disiplin seperti praktisi dari Developer, Kementerian maupun NGO asing termasuk Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yaitu Laili Fuji Widyawati, ST, MT. Ketiga FGD tersebut dihadiri oleh SKPD terkait dan Lurah se Jakarta Selatan. Dari Hasil FGD, teridentifikasi informasi terkait kebijakan pengadaan RTH, tantangan pengadaan lahan oleh praktisi dan urgensi pengadaan lahan RTH.







2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Focuss Group Discussion diadakan FGD sebanyak tiga kali di Jakarta Creative Hub di Jl. Kb. Melati 5 No.20, RT.2/RW.8, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 yaitu tanggal 21 Juni 2019, 11 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 dengan menghadirkan narasumber multi disiplin seperti praktisi dari Developer, Kementerian maupun NGO asing termasuk Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yaitu Laili Fuji Widyawati, ST, MT.

3. Hasil dan Luaran yang Dicapai

- Analisa ketersediaan dan kebutuhan RTH;
- Analisa spasial;
- Analisis lingkungan;
- Buku Mosaik Hijau.

4. Penyerapan Anggaran

No.	Komponen Biaya	Keterangan	Biaya (Rp)
1.	Pembelian barang habis pakai	Kertas 10 rim@30.000	300.000
		Tinta 5 @250.000	1.250.000
		USB	250.000
2.	Biaya transportasi dan akomodasi	Survey lapangan	2.500.000
		Rapat Koordinasi 12 kali @30.000	360.000
3.	Pembelian barang inventaris untuk internal atau mitra	Printer	1.750.000
		Laptop	5.500.000
	Total		11.910.000

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Suatu kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan secara efektif mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang akan menjamin keberlanjutan kualitas dan daya dukung lahan bukan hanya untuk saat ini namun juga bagi generasi mendatang. Lingkungan yang lestari akan memberikan kenyamanan bagi warga yang tinggal di Kota tersebut.

Begitu pula dengan Jakarta, sebagai ibukota negara, dengan tingkat polusi yang tinggi dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas, membutuhkan inovasi baik untuk mempertahankan ketersediaan RTH yang ada serta memfungsikan kembali ruang dan kawasan yang berpotensi sebagai RTH. Buku Mosaik Hijau merupakan bentuk inovasi untuk memetakan lahan-lahan potensial sebagai RTH dan lahan-lahan prioritas pengadaan lahan RTH. Serpihan-serpihan RTH yang tersebar di berbagai wilayah dengan ragam luasan dan jenisnya apabila menjadi kesatuan maka akan membentuk mosaik hijau yang tidak hanya mempercantik kota namun memiliki fungsi ekologis dan sosial ekonomi.

Buku Mosaik Hijau Pengadaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta merupakan suatu upaya perencanaan kawasan perkotaan berbasis prinsip keberlanjutan. Melalui kegiatan ini maka akan teridentifikasi lahan-lahan yang potensial sebagai RTH dan hasil analisis berupa lahan potensial prioritas dalam rangka pengadaan lahan RTH. Berikut beberapa poin-poin kesimpulan:

- *Focuss Group Discussion* diadakan FGD sebanyak tiga kali di Jakarta Creative Hub dengan menghadirkan narasumber multi disiplin seperti praktisi dari Developer, Kementerian maupun NGO asing termasuk Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yaitu Laili Fuji Widyawati, ST, MT.
- Tahap awal kegiatan ini adalah di Jakarta Selatan, berdasarkan kajian teridentifikasi 9,71 km² RTH eksisting yang terdaftar sebagai aset Pemda DKI atau 6.86% dari luas Jakarta Selatan.
- Terdapat lahan potensial 36.456 persil yang peruntukan di dokumen Rencana Tata Ruang DKI Jakarta sebagai Ruang Terbuka Hijau dengan kepemilikan sertifikat (SHM, HGB, dan SHP) serta diluar aset Pemda. Sebanyak 4.467 persil merupakan lahan kosong, dan 31.989 persil lahan terbangun.
- Kendala dalam pengadaan lahan adalah terbatasnya lahan kosong, harga lahan yang tinggi dan anggaran terbatas, terbatasnya parameter pengadaan lahan dan adanya sengketa lahan.
- Terdapat dua pendekatan dan 8 parameter untuk membantu penentuan lahan prioritas pengadaan lahan RTH yaitu lingkungan (daya dukung, suhu permukaan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kejadian genangan) dan lokasi (akses terhadap Jalan, akses terhadap sumber air dan RTH eksisting)

Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Surat Keterangan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat :

Judul : Kajian Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau
Lokasi pelaksanaan : Jakarta Selatan
Nama Ketua tim : Laili Fuji Widyawati,ST,MT
NIDN : 0328028504
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul

Dengan pihak mitra yang diwakili oleh :

Nama : Heri Purwanto

Instansi/badan/komunitas : Kepala Bidang Pertanahan dan Pemetaan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Gedung Teknis Jatibaru
Jalan Taman Jatibaru No. 1, Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir 10150

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05/08/2019



(Heri Purwanto)

- Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah Multi Criteria Analysis-Geographic Information System yang merupakan tahapan yang mengintegrasikan dan mengubah kriteria atau faktor pemetaan (data geografis) dan preferensi dari pembuat kebijakan untuk mencapai penilaian akhir dari alternatif keputusan.
- Berdasarkan kedelapan parameter tersebut maka dikelompokkan kedalam tiga klaster yaitu sangat penting (skor 230-300), penting (170-229) dan cukup penting (100-169).
- Sebanyak 0,79 Ha atau 72 persil termasuk klaster sangat penting dan lahan kosong, 55,40 Ha atau 1963 persil termasuk klaster penting dan lahan kosong, terdapat 82,47 Ha atau 3371 persil termasuk klaster cukup penting dan lahan kosong.
- Sebanyak 9,02 Ha atau 1125 persil termasuk klaster sangat penting dan lahan terbangun, sebanyak 18.539 persil atau 179,58 Ha termasuk klaster penting dan lahan terbangun, dan terdapat 23.039 persil atau 238,84 Ha termasuk klaster cukup penting dan lahan terbangun.

Saran

- Dibutuhkan sistem informasi yang sebagai database ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
- Dibutuhkan kemitraan sinergis antara Pemerintah, swasta dan akademisi.